



**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN
DI KABUPATEN SIKKA**

Micael Josviranto

Universitas Nusa Nipa, Indonesia

(Naskah diterima: 1 Juni 2019, disetujui: 28 Juli 2019)

Abstract

The Sikka Regency Government plays an important role in providing Legal Protection to Tourists in Sikka Regency. This legal protection causes tourists to feel that they have a tourist location, so tourism in Sikka Regency can develop better. This type of research used in this study is qualitative research in the form of interview and natural observation. Types of Legal Materials are tourism and tourism law as well as Regional Regulation No. 3 of 2017 concerning Tourism Business in Sikka Regency. The results showed that it could create business opportunities. With the arrival of tourists, services are needed to provide for the needs (wants), wants (want), and expectations (expectations) of tourists. Tourism is one of the potential resources to substitute other natural resources such as oil and gas which is declining.

Keywords : Local Government, Legal Protection, Tourist.

Abstrak

Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka berperan penting dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan di Kabupaten Sikka. Perlindungan hukum ini menyebabkan wisatawan merasa memiliki lokasi wisata tersebut, sehingga pariwisata di Kabupaten Sikka dapat berkembang menjadi lebih baik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa wawancara dan observasi alami (*natural observation*). Jenis Bahan Hukum adalah kepariwisataan dan hukum kepariwisataan serta Perda No 3 Tahun 2017 tentang Usaha Pariwisata di Kabupaten Sikka. Hasil penelitian menunjukkan dapat menciptakan kesempatan berusaha. Dengan datangnya wisatawan, perlu pelayanan untuk menyediakan kebutuhan (*need*), keinginan (*want*), dan harapan (*expectation*) wisatawan. Pariwisata merupakan salah satu sumber daya potensial pengganti sumber daya alam lain seperti minyak dan gas bumi yang semakin menurun.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Perlindungan Hukum, Wisatawan.

I. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan persoalan fundamental yang mendapat perhatian dari pemerintah karena dampaknya terhadap perekonomian nasional. Dengan kedatangan wisatawan terutama mancanegara ke destinasi Wisata, sangat diharapkan akan mendatangkan keuntungan ekonomi berupa devisa bagi destinasi Wisata tersebut. Seperti kita ketahui, penerimaan devisa negara dari sektor minyak bumi dan gas akhir-akhir ini terus menurun karena keterbatasan teknologi. Komoditi migas secara ekonomis dianggap tidak akan efisien lagi sebagai penghasil devisa negara. Di sisi lain, ketahanan daya saing ekspor non-migas juga tidak dapat diandalkan karena cara berproduksi masih didominasi oleh teknologi rendah, sehingga kualitas produk yang dihasilkan tidak mampu bersaing di pasar global. Investor asing tidak berminat menanamkan modalnya di Indonesia, selain karena keamanan yang labil, terlalu banyak pungli (pungutan liar) untuk memulai suatu bisnis di Indonesia. Kenaikan upah buruh yang terus meningkat mengakibatkan harga produk tidak kuat bersaing di pasar internasional.

II. KAJIAN TEORI

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi kepulauan yang kaya akan keindahan alamnya baik kekayaan pantai, panorama lautnya, bahkan wilayah darat yang dihuni oleh hewan langka Komodo, serta pecahan belerang yang menghasilkan kawah tiga(3) danau yaitu danau kelimutu. Kabupaten Sikka yang merupakan kabupaten yang memiliki lokasi wisata yang indah dan menawan yang memiliki beberapa lokasi wisata yang menjadi tujuan wisatawan baik asing maupun lokal yaitu Pantai Koka, tempat peristirahatan Sao Wisata, Museum Blikon Blewut, dan lokasi lainnya.

Salah satu lokasi wisata yang paling menarik dan indah serta menjadi destinasi wisatawan lokal dan internasional adalah Pantai Koka. Pantai Koka adalah sebuah pantai yang terletak sekitar 40 KM arah selatan kota Maumere. Kondisi pantai yang indah dan menarik bagi para wisatawan ini tidak didukung oleh perilaku warga di sekitar lokasi wisata tersebut. Perilaku warga seperti mabuk-mabukan, pungutan liar (pungli) terhadap para wisatawan menyebabkan wisatawan menjadi tidak nyaman ketika menikmati indahnya lokasi wisata. Di samping itu, juga dari pemerintah setempat

belum menetapkan tarif/bea masuk ke lokasi wisata secara wajar dan terjangkau. Jadi, penentuan bea/tarif masuk dilakukan secara sepihak oleh masyarakat di sekitar lokasi wisata.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa wawancara dan observasi alami (*natural observation*).

Bahan yang akan digunakan berupa buku-buku hasil karya para pakar yang berkaitan dengan kepariwisatawan dan hukum kepariwisataan serta Perda No 3 Tahun 2017 tentang Usaha Pariwisata di Kabupaten Sikka.

IV. HASIL PENELITIAN

Sejak produk andalan bangsa Indonesia yaitu minyak bumi mulai minim, maka bangsa Indonesia mulai beralih ke sektor pariwisata. Setiap wilayah di negara Indonesia diupayakan melestarikan usaha pariwisatanya salah satunya adalah wilayah Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang memiliki potensi sumber daya pariwisata yang tidak kalah jika dibandingkan dengan pulau Bali. Beberapa lokasi wisata andalan seperti danau tiga warna kelimutu, komodo, lokasi wisata dan lain sebagainya.

Kabupaten Sikka merupakan kabupaten yang lagi mengembangkan usaha wisatanya. Wisata pantai masih merupakan wisata andalan seperti lokasi wisata di samping wisata lainnya seperti museum blikon blewut, wisata rohani Nilo, wisata Lepo Lerun tenun ikat. Pariwisata menjadi prioritas utama yang harus dikembangkan di Kabupaten Sikka karena belum ada sumber daya alam untuk menunjang pendapatan asli daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kabupaten Sikka.

Dilihat dari perspektif ekonomi makro, jelas pariwisata memberikan dampak positif, antara lain:

1. Dapat menciptakan kesempatan berusaha. Dengan datangnya wisatawan, perlu pelayanan untuk menyediakan kebutuhan (*need*), keinginan (*want*), dan harapan (*expectation*) wisatawan.
2. Dapat meningkatkan kesempatan kerja. Dengan dibangunnya hotel atau restoran, akan diperlukan tenaga kerja/karyawan yang cukup banyak.
3. Dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat. Sebagai akibat *multiplier effect* yang terjadi dari pengeluaran wisatawan yang relatif cukup besar.

4. Dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah. Setiap wisatawan berbelanja selalu dikenakan pajak sebesar 10% sesuai Peraturan pemerintah yang berlaku.
5. Dapat meningkatkan pendapatan nasional atau *Gross Domestic Bruto (GDB)*.
6. Dapat mendorong peningkatan investasi dari sector industry pariwisata dan sektor ekonomi lainnya.

Unsur-unsur Pariwisata yang mutlak sangat menentukan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah unsur pengelolaan dari:

4.1 Daya Tarik Wisata (*Attractions*)

Dalam kegiatan wisata, ada pergerakan manusia dari tempat tinggalnya menuju ke destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata, merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Dengan demikian, faktor daya tarik wisata merupakan salah satu unsur yang membentuk dan menentukan suatu daerah menjadi destinasi pariwisata.

Setiap destinasi pariwisata memiliki daya tarik berbeda-beda sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki. Di bawah ini adalah jenis daya tarik wisata yang biasanya ditampilkan di destinasi pariwisata:

- a. Daya tarik wisata alam (*natural tourist attractions*), segala bentuk daya tarik yang dimiliki oleh alam, misalnya: laut, pantai, gunung, danau, lembah, bukit, air terjun, ngarai, sungai, hutan
- b. Daya tarik wisata buatan manusia (*man-made tourist attractions*), meliputi: Daya tarik wisata budaya (*cultural tourist attractions*), misalnya: tarian, wayang, upacara adat, lagu, upacara ritual dan daya tarik wisata yang merupakan hasil karya cipta, misalnya: bangunan seni, seni pahat, ukir, lukis.

Daya tarik wisata memiliki kekuatan tersendiri sebagai komponen produk pariwisata karena dapat memunculkan motivasi bagi wisatawan dan menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata, hal demikian terlebih terjadi di destinasi pariwisata yang memiliki sangat beragam dan bervariasi daya tarik wisata, seperti yang ditulis oleh Robert Christie Mill dalam buku "*Tourism: The International*

Business” (1990): “*Attractions draw people to a destination*”.

Attraction atau atraksi adalah produk utama sebuah destinasi. Atraksi berkaitan dengan *what to see* dan *what to do*. Apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di destinasi tersebut. Atraksi bisa berupa keindahan dan keunikan alam, budaya masyarakat setempat, peninggalan bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan. Seharusnya sebuah atraksi harus mempunyai nilai diferensiasi yang tinggi. Unik dan berbeda dari daerah atau wilayah lain.

4.2 Fasilitas dan Jasa Pelayanan Wisata

(Amenities)

Amenity atau amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum. Kebutuhan lain yang mungkin juga diinginkan dan diperlukan oleh wisatawan, seperti toilet umum, *rest area*, tempat parkir, klinik kesehatan, dan sarana ibadah sebaiknya juga tersedia di sebuah destinasi. Tentu saja fasilitas-fasilitas tersebut juga perlu melihat dan mengkaji situasi dan

kondisi dari destinasi sendiri dan kebutuhan wisatawan. Tidak semua amenitas harus berdekatan dan berada di daerah utama destinasi. Destinasi alam dan peninggalan bersejarah sebaiknya agak berjauhan dari amenitas yang bersifat komersial, seperti hotel, restoran dan *rest area*.

Di samping daya tarik wisata, wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata juga membutuhkan adanya fasilitas yang menunjang perjalanan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan perjalanan tersebut perlu disediakan bermacam-macam fasilitas, mulai dari pemenuhan kebutuhan sejak berangkat dari tempat tinggal wisatawan, selama berada di destinasi pariwisata dan kembali ke tempat semula.

4.3 Kemudahan untuk mencapai destinasi wisata (Accessibility)

Dalam suatu perjalanan wisata, terdapat pula faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi kepuasan wisatawan, yaitu faktor aksesibilitas, yang berarti kemudahan yang tersedia untuk mencapai destinasi wisata, yang terkadang diabaikan oleh wisatawan dalam merencanakan perjalanan wisata, sehingga secara umum dapat mempengaruhi *budget* perjalanan mereka tersebut. *Accessibility* atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur

untuk menuju destinasi. Akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi.

4.4 Keramah tamahan (*ancilliary*=*Hospitality*)

Keramahtamahan berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau orang-orang yang mengurus destinasi tersebut. Ini menjadi penting karena walaupun destinasi sudah mempunyai atraksi, aksesibilitas dan amenitas yang baik, tapi jika tidak ada yang mengatur dan mengurus maka ke depannya pasti akan terbengkalai. Organisasi sebuah destinasi akan melakukan tugasnya seperti sebuah perusahaan. Mengelola destinasi sehingga bisa memberikan keuntungan kepada pihak terkait seperti pemerintah, masyarakat sekitar, wisatawan, lingkungan dan para *stakeholder* lainnya. Destinasi wisata dapat menyebabkan munculnya perasaan wisatawan terhadap kebutuhan yang berkaitan dengan keramahtamahan melalui seseorang atau sesuatu, seperti yang ditulis oleh Robert Christie Mill: "*The hospitality of an area is the general feeling of welcome that tourists receive while visiting the area. People do not want to go where they do not feel welcome*" (Mill, 1990). Dengan demikian aspek *hospitality* keramah tamahan ini adalah sangat penting yang memberikan kesan dan

kenangan kepuasan bagi wisatawan dan dapat menciptakan citra positif sebagai pengembangan pemasaran "*words of mouth*" (gethok tular=Jawa) yang merupakan aspek pemasaran yang paling unggul saat ini.

Perspektif masyarakat Sikka terhadap wisatawan asing masih sangat minim sehingga perilakunya sehari-hari menjadi kurang ramah. Masyarakat Sikka terlebih di lokasi wisata menunjukkan itikad buruk. Mereka melakukan banyak pungutan liar dan mabuk-mabukan sehingga menyebabkan wisatawan baik asing maupun lokal menjadi tidak nyaman dan tidak betah untuk berlama-lama di lokasi wisata. Perilaku masyarakat ini dapat menyebabkan dampak buruk bagi usaha pariwisata di kabupaten Sikka. Para wisatawan dapat mencari alternatif destinasi wisata lain manakala yang dapat memberikan rasa aman. Dengan demikian maka usaha wisata bisa menjadi tidak berkembang sebagaimana mestinya.

Di samping itu juga, pendapat asli daerah juga akan berkurang. Karena PAD kabupaten Sikka juga berasal dari sektor pariwisata. Pemerintahan kabupaten Sikka sampai. Pemerintah setempat dalam hal ini kabupaten Sikka belum memberikan dukungan yang maksimal dalam proses

pengaturan pariwisata di kabupaten Sikka. Belum adanya regulasi berupa peraturan daerah tentang pariwisata yang mengatur *klausul* tentang bea masuk pada lokasi wisata di kabupaten sikka sekaligus dengan perilaku yang buruk. Maka dengan demikian harus dibuatkan Perda pariwisata berkaitan dengan *klausul* bea dan tarif masuk serta perilaku dengan itikad baik ketika berhadapan dengan wisatawan. Di samping itu juga penegakan hukum menjadi hal yang sangat urgen, supaya terciptanya situasi yang nyaman dan usaha pariwisata di kabupaten Sikka dapat berkembang dan mendatangkan hasil yang memuaskan.

V. KESIMPULAN

Pariwisata merupakan salah satu sumber daya potensial pengganti sumber daya alam lain seperti minyak dan gas bumi yang semakin menurun. Sebagai sumber daya potensial maka pariwisata ini harus ditumbuhkembangkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) demi kemajuan kualitas hidup masyarakat di kabupaten Sikka. Tetapi di pihak lain tidak didukung oleh masyarakat setempat hal ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat Sikka yang tidak ramah terhadap wisatawan sehingga mengakibatkan wisatawan menjadi tidak nyaman.

Perilaku kurang kooperatif dari masyarakat di sekitar lokasi wisata yaitu pungutan liar terhadap bea/tarif masuk dan mabuk-mabukan. Perilaku kurang kooperatif dari masyarakat ini dapat diminimalisir dengan regulasi yang diciptakan oleh pemerintah daerah kabupaten Sikka manakala saat ini belum ada perda usaha pariwisata yang mengatur tentang *klausul* tentang bea/tarif masuk serta perilaku mabuk-mabukan di lokasi wisata. Ketika regulasi ini sudah diciptakan maka harus pula disosialisasikan supaya masyarakat di kabupaten Sikka mengetahui dan memahami serta melaksanakan Perda tersebut.

Dalam penelitian ini ada beberapa saran yaitu; *pemerintahan kabupaten Sikkayaitu* bahwa harus memasukan *klausul* tarif/bea masuk pada lokasi wisata serta perilaku masyarakat yang ramah terhadap para wisatawan dalam Perda Sikka tentang Usaha Pariwisata tersebut. Karena dengan itu akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kabupaten Sikka. *Masyarakat kabupaten Sikka*, yaitu harus lebih ramah kepada para wisatawan terlebih wisatawan asing, karena wisatawan asing merupakan pemasuk devisa terbesar untuk daerah kabupaten Sikka.

DAFTAR PUSTAKA

Geldel, 2006, *Industri Pariwisata Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO)*, Refika Aditama, Bandung

Wyasa Putra, dkk., 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Refika Aditama, Bandung

Arya Utama, IMade, 2007. *Hukum Lingkungan-Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, Bandung.

Geriya, 1998, *Pandangan Sikap Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Kepariwisata*, Makalah Pada Seminar Aspek-Aspek Hukum Kepariwisata, Diselenggarakan Dalam Rangka Perayaan HUT Fakultas Hukum XXXIV Dan Dies Natalis Universitas Udayana XXXVI, Denpasar, 26 September 1998.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Usaha Pariwisata.

Elisabetz Misa dan Briyan 2019. Wawancara di lokasi penelitian.